



Keterkaitan Peran *Stakeholders* dalam Penerapan *Green Fiscal Policy* pada Era Pandemi COVID-19 di Indonesia

The Relationship of Stakeholders' Role in the Implementation of Green Fiscal Policy at the Era of the COVID-19 Pandemic in Indonesia

Adi Artino¹

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

Endy Grade Tampubolon

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

A. Apipudin

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

Artikel Masuk : 4 Agustus 2022

Artikel Diterima : 4 April 2023

Tersedia Online : 30 April 2023

Abstrak: Pandemi COVID-19 menimbulkan banyak permasalahan di berbagai aspek. Pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan umum termasuk kebijakan fiskal dalam menghadapi krisis pandemi ini. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kebijakan fiskal pemerintah pada tahun 2020-2021 dalam mengantisipasi potensi krisis iklim pascapandemi COVID-19 serta mengetahui efisiensi dan efektivitas kebijakan tersebut terhadap pemulihan ekonomi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Metode penelitian dilakukan melalui metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*). Metode kuantitatif digunakan untuk melihat pengaruh serta efisiensi dan efektivitas dari belanja pemerintah/kebijakan fiskal yang dilakukan pada masa pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan metode kualitatif dilakukan dalam rangka memperkuat teori dan temuan berdasarkan teori-teori yang sudah ada, hasil penelitian terdahulu dan juga mendeskripsikan variabel variabel kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah sudah sesuai dengan apa yang disarankan oleh ekonom dunia. Efisiensi pengeluaran anggaran terhadap sektor-sektor yang dapat berkontribusi terhadap aspek lingkungan hidup dan menekan dampak perubahan iklim sudah berada pada tingkatan pemanfaatan anggaran yang optimal. Analisis *stakeholders* menjelaskan media massa, Kementerian Keuangan, dan Bappenas memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung tertinggi. Peran ketiga aktor ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan peningkatan stimulus fiskal hijau, penurunan angka kematian COVID-19, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan penekanan infeksi COVID-19 dengan memberikan dukungan terhadap sektor Kesehatan yang besar juga dibarengi dengan pengolahan limbah dari sektor Kesehatan. Mengevaluasi kembali pengalokasian dan pemanfaatan anggaran di

¹ Korespondensi Penulis: Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia
Email: adiartino29@gmail.com

2 Keterkaitan Peran Stakeholders dalam Penerapan Green Fiscal Policy...

sektor-sektor yang memiliki nilai efisiensi rendah terhadap dampak ekonomi sekaligus dampak lingkungan.

Kata Kunci: DEA; kebijakan fiskal hijau; kebijakan anggaran; *stakeholders*

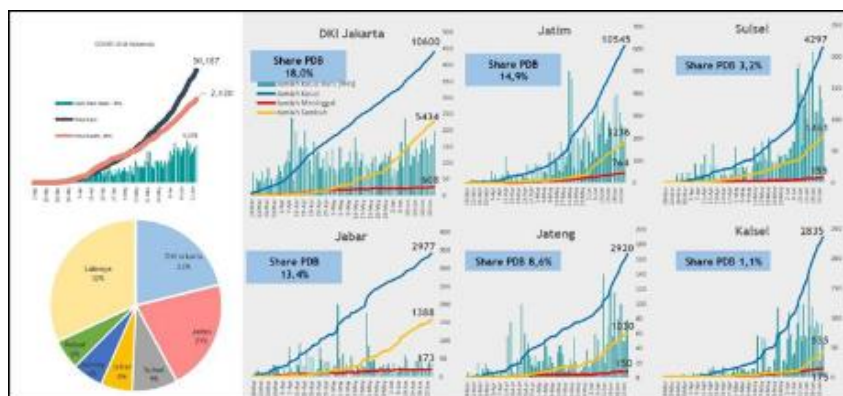
Abstract: *The COVID-19 pandemic has caused many problems in various aspects. The government has issued various general policies including fiscal policies in dealing with this pandemic crisis. The aim of this research is to review government fiscal policies in 2020-2021 in anticipating the potential for a post-pandemic COVID-19 climate crisis and to find out the efficiency and effectiveness of these policies for economic, health and environmental recovery. life. The research method was carried out through quantitative and qualitative methods (mixed method). Quantitative methods are used to see the effect and efficiency and effectiveness of government spending/fiscal policies carried out during the pandemic on economic growth, while qualitative methods are carried out in order to strengthen theories and findings based on existing theories, results of previous research and also describe variables fiscal policy variable. The fiscal policy taken by the government is in accordance with what is suggested by world economists. The efficiency of budget spending on sectors that can contribute to environmental aspects and reduce the impact of climate change is already at the level of optimal budget utilization. Stakeholder analysis explains that the mass media, the Ministry of Finance and Bappenas have the highest direct and indirect influence. The roles of these three actors have been very influential in the success of increasing green fiscal stimulus, reducing the COVID-19 mortality rate, and economic growth. The policy of suppressing the COVID-19 infection by providing support to the large Health sector is also accompanied by processing waste from the Health sector. Re-evaluate the allocation and utilization of the budget in sectors that have low efficiency values in terms of economic as well as environmental impacts.*

Keywords: *DEA; budget policy; green fiscal policy; stakeholders*

Pendahuluan

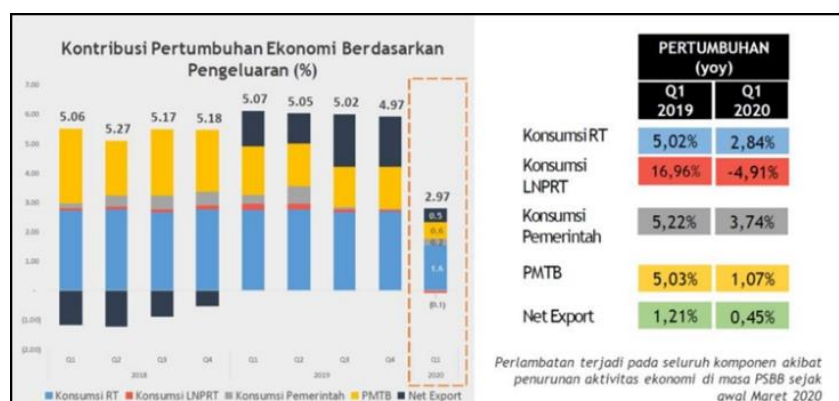
Pandemi COVID-19 merupakan fenomena global yang dapat dikatakan sebagai *extraordinary disaster*. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya berimbas pada kesehatan manusia, tapi lebih dari itu dampaknya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh negara di dunia. Pada Juni 2020, Worldometer mencatat Amerika Serikat, Brazil, dan India sebagai negara dengan tingkat kasus positif COVID-19 tertinggi. Pada tahun yang sama, angka positivitas COVID-19 terus bereskalasi seiring penyebarannya yang masif. Hingga Juni 2020, tercatat sebanyak 50.187 kasus positif COVID-19 dengan tambahan kasus baru positif COVID-19 mencapai 1.178. Sementara itu, angka kematian akibat COVID-19 mencapai 2.620 jiwa. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang memiliki jumlah penyebaran COVID-19 yaitu sebesar 10.600 kasus. Diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan total kasus 10.545 kasus, Provinsi Sulawesi Selatan 4.297 kasus, Provinsi Jawa Barat 2.977 kasus, Provinsi Jawa Tengah 2.920 kasus dan Provinsi Kalimantan Selatan 2.853 kasus sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

Dari sisi dampak, COVID-19 juga berhasil memukul pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan (yoy) yang cukup signifikan jika dilihat dari perbandingan Q1 di tahun 2019 dengan Q1 tahun 2020. Adapun rincian perbandingan kondisi Q1 antara tahun 2019 dengan 2020 dapat diuraikan sebagai berikut: konsumsi rumah tangga semula 5,02% mengalami penurunan menjadi 2,84%; konsumsi LNPRD dari 16,96% turun menjadi -4,91%; konsumsi pemerintah dari 5,22% turun menjadi 3,74%; PMTB dari 5,03% turun menjadi 1,07%; dan Net Export dari 1,21% turun menjadi 0,45%. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2020

Gambar 1. Penyebaran COVID-19 di Indonesia

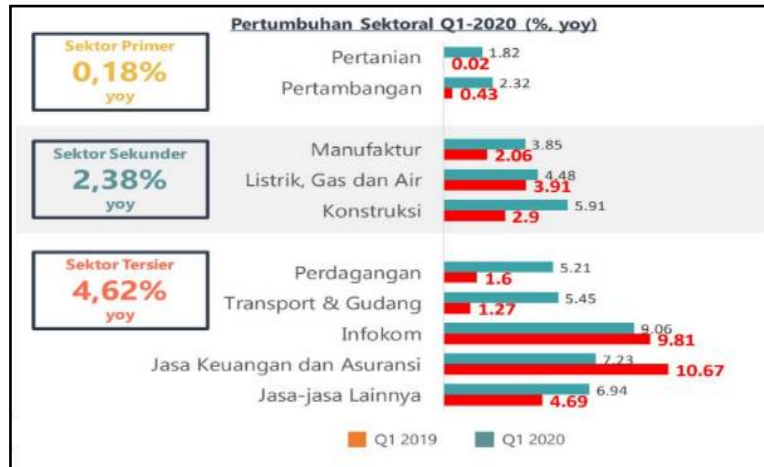


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Akibat COVID-19 di Q1-20

Sektor utama yang menopang perekonomian nasional pun mengalami perlambatan. Sektor pertanian, mengalami stagnasi yang disebabkan cuaca ekstrem pada awal tahun dan terjadinya pergeseran masa tanam padi. Sektor industri pengolahan, mengalami perlambatan dan juga mengindikasikan pelemahan permintaan dan penurunan *output* produksi. Sektor infokom dan jasa keuangan, agak berbeda dengan sektor-sektor sebelumnya karena hanya sektor ini yang mengalami peningkatan pertumbuhan akibat adanya perubahan pola aktivitas masyarakat dengan penerapan *social distancing* atau pembatasan sosial. Pembatasan ini juga berdampak pada beberapa sektor lainnya seperti sektor konstruksi maupun sektor perdagangan dan juga sektor transportasi yang dapat dilihat seperti Gambar 3.

4 Keterkaitan Peran Stakeholders dalam Penerapan Green Fiscal Policy...



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 3. Pertumbuhan Sektor Q1 2020

Kondisi inilah yang memicu turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi, pemutusan-pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan pada akhirnya meningkatkan angka masyarakat miskin di Indonesia akibat COVID-19. Sebelum COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 5,3% (APBN, 2020). Namun, munculnya COVID-19 menyebabkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar -0,4% (skenario sangat berat) dan 1,0% (skenario berat).



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Gambar 4. Dampak Pelemahan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Respon kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap eskalasi kasus COVID-19 yaitu dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sekaligus mempersiapkan payung hukum pelaksanaan penanganan pandemi dengan menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal Pemerintah Indonesia dalam merespon dan menangani pandemi COVID-19 sekaligus mengantisipasi potensi krisis iklim pascapandemi COVID-19. Kebijakan fiskal yang dianalisis akan fokus kepada kebijakan

belanja pemerintah di tahun 2020-2021. Selain itu, menganalisis efisiensi dan efektivitas kebijakan fiskal yang diambil serta melihat dampaknya terhadap pemulihan ekonomi, kesehatan serta dukungan terhadap aspek lingkungan hidup atau pembangunan rendah emisi.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang didasarkan pada kewenangan pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui perubahan-perubahan pada pajak dan pengeluaran/belanja pemerintah. Instrumen pajak ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan kebijakan-kebijakan seperti menurunkan tarif pajak, bea masuk, penghasilan tidak kena pajak, maupun pembebasan pajak pada daerah-daerah tertentu. Kebijakan-kebijakan tersebut berfungsi sebagai insentif yang ditujukan untuk memperbaiki iklim investasi daerah maupun negara. Di lain pihak, instrumen pengeluaran/belanja pemerintah meliputi pemberian subsidi dan modal kerja bagi masyarakat, serta belanja yang diarahkan untuk membangun berbagai infrastruktur berupa jalan raya, pelabuhan, bandara, jembatan, atau pasar (Nawawi & Irawan, 2010).

Di antara kedua komponen tersebut, yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak, yang dinilai lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di masa resesi ialah pengeluaran pemerintah. Silalahi & Ginting (2020) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan pajak. Dampak pengeluaran pemerintah terhadap menurunnya tingkat inflasi disebabkan oleh efek pengganda (*multiplier effect*) pada investasi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur lebih besar daripada belanja rutin. Belanja pemerintah untuk membangun infrastruktur dapat memperbaiki pendistribusian barang dan jasa sehingga laju inflasi dapat ditekan.

Sifat pengeluaran pemerintah ialah otonom, ditentukan oleh besaran pajak yang diterima, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat politis, dan permasalahan spesifik yang dihadapi pemerintah. Melalui pengeluaran pemerintah, dapat tercermin kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Kebijakan pengadaan barang dan jasa tertentu, misalnya, dicerminkan oleh besarnya alokasi biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas tersebut (Silalahi & Ginting, 2020). Landasan teori mengenai pengeluaran pemerintah menurut pandangan Keynesian ditunjukkan melalui persamaan keseimbangan pendapatan nasional (lihat Persamaan 1).

$$Y = C + I + G (X - M) \quad (1)$$

Keterangan: Y= pendapatan nasional; C= konsumsi rumah tangga; I= investasi perusahaan; G= pengeluaran pemerintah; X= ekspor; M= impor

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan maupun penurunan pendapatan nasional dipengaruhi oleh besar kecilnya pengeluaran pemerintah, yang secara nyata memperlihatkan intervensi pemerintah dalam perekonomian negara. Pengeluaran pemerintah dialokasikan pada tiga kelompok utama, yaitu: pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran untuk membayar gaji pegawai, dan pengeluaran untuk melakukan *transfer payment* (Silalahi & Ginting, 2020). Kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2020 tercatat sebagai yang terburuk dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, yaitu pertumbuhan ekonominya hanya sebesar $-2,07\%$. Dampak melemahnya perekonomian Indonesia sangat terasa bagi seluruh pelaku ekonomi, mulai dari sektor rumah tangga, perusahaan, UMKM, hingga sektor perbankan. Selain itu, aktivitas-aktivitas ekonomi seperti investasi, ekspor-impor, dan konsumsi masyarakat juga mengalami penurunan (Lativa, 2021).

Dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi makro Indonesia sebagai berikut: 1) pemutusan hubungan kerja dan dirumahkannya karyawan secara besar-besaran, baik pada sektor formal maupun informal; 2) penurunan jumlah penumpang secara drastis pada sektor penerbangan akibat pemberlakuan pembatasan perjalanan; 3) penurunan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara; 4) penurunan tingkat okupansi hotel-hotel di seluruh Indonesia akibat menurunnya jumlah tamu maupun acara atau kegiatan; 5) penurunan aktivitas restoran atau rumah makan, pedagang eceran, UMKM, dan terutama pedagang kecil akibat sepi pembeli atau berkurangnya jumlah pengunjung; 6) timbulnya inflasi sebesar 2,96% di bulan Maret 2020 akibat kenaikan secara signifikan harga emas dan bahan-bahan pangan; 7) penurunan penerimaan pajak pada sektor perdagangan; 8) penurunan ekspor migas dan non-migas Indonesia, khususnya yang ditujukan ke China yang merupakan importir minyak mentah terbesar bagi Indonesia; dan 9) penurunan kegiatan investasi asing karena kecenderungan investor menghindari risiko atau tertundanya investasi (Fahraka & Roy, 2020).

Pada Maret 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan *refocusing* anggaran, realokasi anggaran, dan perbelanjaan barang dan jasa melalui pemberlakuan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia. Adapun kebijakan realokasi anggaran yang diberlakukan di beberapa Kementerian atau Lembaga (K/L) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Realokasi Anggaran pada Kementerian atau Lembaga (K/L)

Kementerian/Lembaga (K/L)	Target
Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan obat buffer stock • Alat dan bahan pengendalian COVID-19 • Pengiriman alat kesehatan ke Natuna • Pengadaan tes cepat COVID-19 • Sosialisasi dan edukasi • Pemeriksaan lab specimen COVID-19
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Penanganan COVID-19 pada RS Perguruan Tinggi Negeri
Kementerian Pertahanan	Pengadaan alkes dan rapid tes di RSPAD dan RS dr. Sutoyo
Polri	Anggaran satgas COVID-19 RS Polri
Kementerian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Evakuasi WNI • Pembelian tiket untuk WNI terlantar
Kementerian dan lembaga lainnya	Peralatan pencegahan COVID-19: Tenda disinfektan, sanitiser, thermo scanner, masker, rapid tes, sarung tangan, dll.

Sumber: APBN, 2020

Peningkatan pengeluaran pemerintah pada masa pandemi COVID-19 terjadi karena peningkatan upaya penanganan yang dilakukan untuk menanggulangi wabah dalam bentuk pengadaan obat-obatan, pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk menampung pasien COVID-19, dan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Walaupun demikian, pemerintah tetap meyakini bahwa realisasi anggaran tidak akan melebihi perencanaan yang telah ditetapkan (Mirani et al., 2021).

Blanchard et al. (2020) mengatakan bahwa dalam resesi normal, kontrol terhadap agregat permintaan merupakan motivasi utama dalam menerapkan kebijakan fiskal. Namun demikian, kondisi saat ini bukanlah resesi yang normal dan kondisi saat ini juga

memiliki implikasi yang penting. Hasil studi terkait fiskal hijau dan pemulihan ekonomi hijau dalam masa pandemi COVID-19 sudah dikeluarkan oleh berbagai institusi. IMF dalam *fiscal affair* (2019) (Gbohoui & Medas, 2019) mengatakan respon kebijakan fiskal saat ini terhadap isu perubahan iklim dapat berdampak positif baik bagi ekonomi, kesehatan maupun iklim dalam rentang waktu ke depan. Kebijakan fiskal hijau juga dapat memperkuat kerekatan sosial dan mengakselerasi transisi menuju netralitas atas dampak perubahan iklim dan pemulihan ekonomi, dibandingkan kebijakan yang menekankan kepada pembangunan *business as usual* (Phillips et al., 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia berfokus pada penerapan kebijakan fiskal pada masa pandemi COVID-19 khususnya pada belanja pemerintah (pengeluaran) dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus melihat kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi potensi krisis yang disebabkan oleh perubahan iklim pascapandemi COVID-19. Waktu penelitian ini difokuskan pada belanja pemerintah (kebijakan fiskal) pada kurun waktu 2020-2021. Jenis penelitian ini dilakukan melalui metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*). Metode kuantitatif digunakan untuk melihat pengaruh serta efisiensi dan efektivitas dari belanja pemerintah/kebijakan fiskal yang dilakukan di masa pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan metode kualitatif dilakukan dalam rangka memperkuat teori dan temuan berdasarkan teori-teori yang sudah ada, hasil penelitian terdahulu dan juga mendeskripsikan variabel variabel kebijakan fiskal. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini di antaranya data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara ahli dalam menentukan variabel kunci serta *stakeholders* yang terlibat penuh dalam penentuan kebijakan fiskal. Sementara itu, data sekunder bersumber dari laporan-laporan APBN, Laporan Bappenas, Laporan Badan Pusat Statistik yang sudah dipublikasikan secara resmi dan juga beberapa literatur lain yang menguatkan penelitian ini.

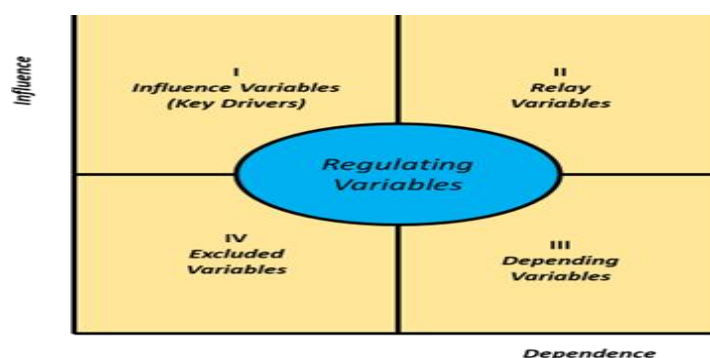
Data Envelopment Analysis (DEA)

DEA didasarkan pada *linear programming* dengan pengukuran efisiensi pada variabel input dan *output*. Analisis ini memungkinkan untuk bisa menganalisis *multi input* dan *multi output*. Pengukuran keragaan dilakukan melalui unit yang disebut *Decision Making Unit* (DMU). Dalam analisis ini, konsep efisiensi diukur secara relatif terkait unit yang memiliki keragaan terbaik. Adapun beberapa input yang akan dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu Belanja Sektor Kesehatan (Input 1) dan Belanja Sektor Lingkungan (Input 2), sedangkan untuk *output* menggunakan pertumbuhan ekonomi (*Output*). Asumsi yang dibangun pada pembuatan model ini, yaitu *Constant Return to Scale* (CRS). Peneliti ingin melihat peningkatan input secara proporsional akan meningkatkan *output* dengan proporsi yang sama. Selain itu, pembuatan asumsi model juga dapat menggunakan asumsi non-konstan, yaitu *Increasing Return to Scale* (IRS) dan *Decreasing Return to Scale* (DRS). *Increasing Return to Scale* terjadi jika peningkatan input secara proporsional akan meningkatkan *output* lebih dari proporsi peningkatan input, jika sebaliknya maka akan menggambarkan situasi *Decreasing Return to Scale*. Alat bantu analisis ini menggunakan aplikasi Win4Deap.

Analisis MICMAC (Analisis Variabel Kunci)

Pendekatan MICMAC mengandalkan pemikiran analisis melalui pemecahan yang sistematis terhadap suatu masalah. Oleh sebab itu, analisis MICMAC dimulai dari perumusan masalah (*problem solving*). Analisis MICMAC dilakukan untuk menganalisis

hubungan antar variabel dan pembobotan terhadap hubungan tersebut berdasarkan derajat mobilitas dan ketergantungannya antar variabel (Ariyani & Fauzi, 2019). MICMAC variabel dikelompokkan menjadi empat kuadran, yaitu kuadran satu influences variabel sebagai *key drivers*, *relay variabel*, *depending variabel*, dan *exclude variabel* seperti terlihat dalam Gambar 5.



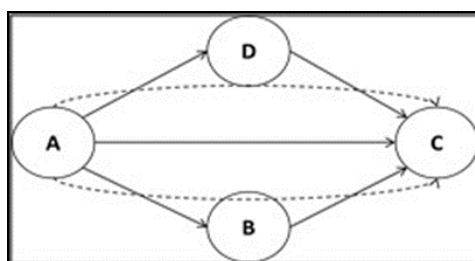
Sumber: (Fauzi, 2019)

Gambar 5. Pemetaan Variabel dalam MICMAC

Pada Gambar 5 menjelaskan bahwa *influence variabel* disebut *determinant variabel* yang menggambarkan variabel yang sangat berpengaruh dengan sedikit ketergantungan. Variabel ini merupakan elemen yang krusial dalam sistem karena dapat bertindak sebagai faktor kunci. Pada kuadran II terdapat *relay variabel* yang memiliki sifat berpengaruh tapi sangat tergantung (*dependent*), faktor ini juga menggambarkan ketidakstabilan suatu sistem. Pada kuadran III terletak *dependent variabel* yang dicirikan dengan ketergantungan yang tinggi tapi memiliki pengaruh yang kecil. Sedangkan untuk kuadran IV menggambarkan *exclude variabel* atau *autonomous variabel* yang dicirikan oleh pengaruh yang kecil dan ketergantungan yang kecil. Variabel ini dikatakan *exclude* karena tidak akan menghentikan bekerjanya suatu sistem maupun memanfaatkan suatu sistem itu sendiri.

Analisis MACTOR (Stakeholders)

Metode MACTOR menggunakan tiga input utama, yaitu: *pertama*, posisi aktor terhadap masalah, ini akan terekam dalam matrix (MAO) atau *matrix actors objective*. Skoring terhadap input ini, bila aktor mendukung suatu tujuan (*objective*) maka akan diberi nilai 1, bertentangan (-1) atau netral (0). Input *kedua* adalah isu penting bagi aktor, ini akan disimpan dalam matriks MAO. Ini mewakili pentingnya setiap masalah bagi seorang aktor, skala mulai dari nilai 0 (tidak penting) sampai nilai 4 (sangat penting). Sebenarnya, bila matriks tersebut digabung dengan posisi matriks lainnya, maka akan menciptakan matriks 2 MAO. *Ketiga*, pengaruh aktor satu sama lain, disimpan dalam *matrix indirect direct influence* (MIDI). Setiap aktor dapat saling memengaruhi, diukur pada skala mulai dari nilai 0 sampai nilai 4, nilai 0 berarti tidak ada pengaruh dan nilai 4 pengaruh yang sangat tinggi. Ketiga input utama ini dikumpulkan dalam tiga matriks.



Sumber: Fauzi, 2019

Gambar 6. Model Pengaruh Tidak Langsung Antaraktor

Model MACTOR yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Godet dengan formula dan langkah-langkah pada Persamaan 2, 3, dan 4 (Fauzi, 2019).

$$MIDI_{a,b} = MID_{a,b} + \sum(\min(MID_{a,c}, MID_{c,b})) \quad (2)$$

$MIDI_{a,b}$ merupakan hubungan langsung & tidak langsung antara dua aktor. Sedangkan $MID_{a,b}$ merupakan hubungan langsung lemah aktor a dan c. Sementara $MID_{c,b}$ adalah hubungan langsung lemah aktor c dan b.

$$I_a = \sum(MIDI_{a,b}) - (MIDI_{a,a}) \quad (3)$$

$$D_a = \sum(MIDI_{b,a}) - (MIDI_{a,a}) \quad (4)$$

I_a merupakan pengaruh tidak langsung aktor a, D_a merupakan pengaruh langsung aktor a, \sum_b merupakan jumlah hasil pengurangan aktor a & b, $MIDI_{a,b}$ merupakan hubungan langsung dan tidak langsung antara aktor a & b, dan $MIDI_{a,a}$ merupakan hubungan langsung dan tidak langsung aktor a. Kemudian langkah-langkah lainnya secara operasional untuk menyusun model MACTOR, yakni untuk menyusun aktor, tujuan, dan strategi dalam menganalisis kebijakan fiskal di era pandemi COVID-19. Aktor dapat didefinisikan sebagai lembaga hukum, politik, dan birokrasi yang mana dalam penelitian terdapat beberapa aktor yang akan di teliti, yaitu; Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal), Bappenas Direktorat Lingkungan Hidup, Lembaga Mitra Pembangunan (GIZ, UNDP, Worldbank, dan UKCCU), LSM Lingkungan, dan Akademisi Pemerhati Kesehatan dan Lingkungan.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Fiskal di Era Pandemi COVID-19

Dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan penyesuaian pada indikator asumsi dasar ekonomi pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dari 5,3% menjadi 2,3%. Inflasi juga mengalami kenaikan dari semula 3,1% menjadi 3,9%. Bahkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mengalami depresiasi hingga 17,500 dan harga minyak dan gas juga mengalami kontraksi. Kondisi ini membuat pemerintah melakukan perubahan APBN melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang

kemudian diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Perbedaan postur APBN dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Postur APBN 2020 Beserta Perubahannya dan APBN 2021 (Triliun Rupiah)

	APBN 2020	Perpres 54/2020	Perpres 72/2020	APBN 2021
Pendapatan Negara	2.233,1	1.760,8	1.699,9	1.743,6
▪ Penerimaan Perpajakan	1.865,7	1.462,6	1.404,5	1.444,5
▪ PNBPN	366,9	297,7	294,1	298,2
▪ Hibah	0,49	0,49	1,3	0,9
Belanja Negara	2.540,4	2.613,8	2.739,1	2.750,0
▪ Belanja Pemerintah Pusat	11.683,4	1.851,1	1.975,2	1.954,5
▪ Transfer ke Daerah dan Dana Desa	856,9	762,7	763,9	795,5
Pembiayaan Anggaran	307,2	852,9	1.039,2	1.006,4
Defisit APBN Per PDB	-1,76%	-5,07%	-6,34%	-5,7%
Keseimbangan Primer	-0,0012	-0,51	-0.70 (700,4)	(633,1)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020-2021

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan negara di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 23,9%, yang semula sebesar Rp 2.233,1 triliun menjadi Rp 1.699,9 triliun. Penurunan ini disebabkan pemerintah memberikan insentif perpajakan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan secara bersamaan menstimulasi dunia usaha agar tetap melakukan aktivitasnya di tengah pandemi COVID-19. Belanja K/L mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 sebesar Rp 836,4 triliun dan di tahun 2021 menjadi Rp 1.032,0 triliun atau meningkat sebesar 23%. Ini dikarenakan beberapa anggaran kegiatan di tahun 2020 direlokasi ke dalam PEN dan pada tahun 2021 dikembalikan anggaran ke dalam kegiatan regular K/L dalam rangka mempercepat serapannya.

Tabel 3. Dukungan Fiskal Melalui PEN Tahun 2020 - 2021

No	Program	2020 (Triliun)	2021 (Triliun)
1	Dukungan sektor Kesehatan	87,5	214,96
2	Perlindungan sosial	203,9	186,64
3	Pemberian insentif usaha	120,6	62,83
4	Dukungan UMKM dan Korporasi	177,0	162,40
5	Dukungan sektoral K/L dan Pemda atau program Prioritas (2021)	106,1	117,84
Total		695,2	744,77

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020-2021

Dukungan fiskal dalam menangani dampak COVID-19 mengalami peningkatan sebesar 7%, dari Rp 695,20 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 744,77 triliun di tahun 2021 (Tabel 3). Dukungan sektor kesehatan mengalami peningkatan dari Rp 87,5 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 214,96 triliun atau meningkat sebesar 59%. Peningkatan ini disebabkan oleh penggunaan untuk RS darurat Asrama Haji di Pademangan, Pembagian paket obat masyarakat dan penebalan PPKM, biaya perawatan untuk 580,29 ribu pasien, insentif tenaga Kesehatan untuk 1,26 juta tenaga Kesehatan pusat dan santunan kematian untuk 466 tenaga Kesehatan, pengadaan 121,41 juta dosis vaksin dan bantuan iuran JKN untuk 34,71 juta orang.

Tabel 4. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi

Fungsi APBN	Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Miliar Rupiah)		
	2019	2020	2021
Pelayanan umum	517342.00	474999.70	526181.30
Pertahanan	108429.00	131246.40	137185.60
Ketertiban dan keamanan	142972.00	162729.00	166632.20
Ekonomi	389600.00	406175.40	511338.10
Lingkungan hidup	17764.00	18360.60	16689.90
Perumahan dan fasilitas umum	26516.00	30359.50	33217.30
Kesehatan	62758.00	61148.30	111666.70
Pariwisata dan budaya	5325.00	5056.70	5261.40
Agama	10143.00	10090.80	11075.80
Pendidikan	152690.00	156894.40	175236.50
Perlindungan sosial	200801.00	226416.50	260063.60
Jumlah	1634340.00	1683477.20	1954548.50

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan data Fungsi APBN 2020-2021 (lihat Tabel 4) untuk belanja pemerintah dari beberapa sektor mengalami perubahan anggaran yang signifikan dimana anggaran kesehatan dari tahun 2019-2020 masih stabil di angka 62-61 triliun, sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 111,7 triliun.

Dukungan Kebijakan Fiskal terhadap Pembangunan Rendah Karbon dan Perubahan Iklim

Pada masa pandemik COVID-19, pemerintah melakukan realokasi dan *refocusing* terhadap semua sektor, dan dampaknya juga terjadi pada penurunan anggaran Pembangunan Rendah Karbon atau anggaran Perubahan Iklim. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, anggaran di tahun 2019 mulai mengalami peningkatan sebesar 2% dari Rp 21.439,89 miliar di tahun 2018 menjadi Rp21.877,66 miliar di tahun 2019. Akibat kebijakan pemerintah yang memfokuskan kepada penanganan dampak COVID-19 maka pada tahun 2019 anggaran pembangunan rendah karbon mengalami penurunan sebesar 28% yaitu Rp 15.707,92 miliar pada tahun 2020. Pembagian anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

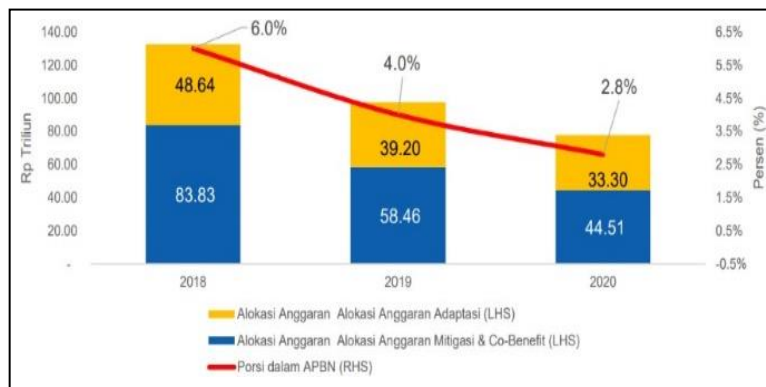
Tabel 5. Pendanaan Pembangunan Rendah Karbon pada Level Komponen 2018-2020 (Rp Miliar)

Sektor	2018	2019	2020
Energi	Rp 3.067,21	Rp 2.324,48	Rp 1.903,15
Industri	Rp 38,73	Rp 19,13	Rp 14,02
Kehutanan dan Gambut	Rp 865,84	Rp 2.975,10	Rp 1.604,82
Pertanian	Rp 292,74	Rp 168,22	Rp 264,26
Limbah	Rp 71,88	Rp 43,88	Rp 147,78
Pesisir dan Kelautan	Rp 43,50	Rp 46,22	Rp 440,82
Transportasi	Rp 17.059,99	Rp 16.300,62	Rp 11.333,08
Total	Rp 21.439,89	Rp 21.877,66	Rp 15.707,92

Sumber: Bappenas, 2020

Berdasarkan data Kementerian Keuangan terkait anggaran perubahan iklim untuk Kementerian dan Lembaga pada level output memperlihatkan adanya tren penurunan porsi anggaran perubahan iklim dalam APBN tahun 2018 hingga 2020 (lihat Gambar 7). Porsinya menjadi 2,8% dalam APBN di tahun 2020 dikarenakan dampak dari kebijakan relokasi

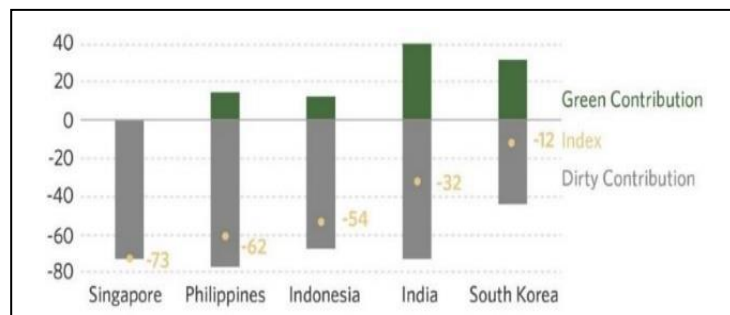
anggaran Kementerian dan Lembaga. Rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim dalam APBN 2018-2020 sebesar Rp102,65 triliun per tahun (Nawawi, 2021).



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Gambar 7. Pendanaan Untuk Perubahan Iklim Pada Level Output 2018-2020 (Rp Miliar)

Dalam kajian Mills et al. (2021) yang membandingkan indeks hijau dari lima negara di Asia (lihat Gambar 8), dapat dilihat bahwa Korea memiliki stimulus fiskal hijau tertinggi yaitu 53% dari PDB nya dan diikuti oleh India sebesar 31%. Sementara itu, stimulus fiskal Indonesia hanya sebesar 4%. Sektor utama yang banyak mendapatkan stimulus hijau di Indonesia adalah sektor energi.

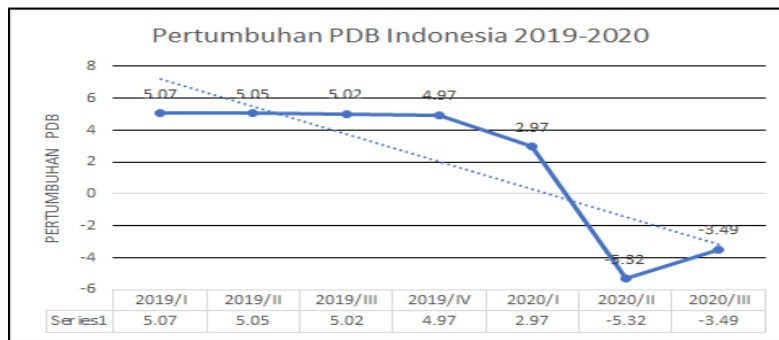


Sumber: Vivid economic dan CPI, 2021

Gambar 8. Indeks Hijau Indonesia Dengan Lima Negara di Asia

Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi

Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia sangat terasa di semua lini kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah membuat aktivitas perekonomian menjadi terhambat dan menyebabkan penurunan pertumbuhan yang sangat signifikan di level negative sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 9.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 9. Pertumbuhan PDB Indonesia 2019-2020

Pada kuartal I tahun 2019, PDB Indonesia berada di kisaran 5.07% terjadi kontraksi sebesar 0.02% menjadi 5.05%. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia mengakibatkan kontraksi penurunan PDB yang sangat signifikan sampai -5.32% pada tahun 2020 di kuartal ke III dan sempat mengalami perbaikan pada kuartal ke IV menjadi -3.49% (lihat Gambar 10). Resesi yang terjadi karena adanya inflasi, penurunan impor, dan kerugian beberapa sektor pariwisata seperti hotel dan restoran serta perusahaan penerbangan. Pemerintah harus melakukan stabilisasi pertumbuhan ekonomi dengan melakukan berbagai kebijakan yang ada, baik secara fiskal dan moneter (Yamali & Putri, 2020).



Sumber: Katadata, 2021

Gambar 10. Pertumbuhan PDB Konsumsi Pemerintah

Badan Pusat Statistik menjelaskan terkait data PDB atas dasar harga berlaku pemerintah Indonesia jika dilihat dari konsumsi pemerintah terjadi pertumbuhan signifikan sebesar 8.06% terjadi pada kuartal ke II Tahun 2021 atau sebesar Rp 210,73 triliun. Hal ini menjadi sentimen positif mulai terjadinya penyesuaian dalam sektor ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ada dua komponen yang menyebabkan pertumbuhan PDB Indonesia, yaitu Komponen PDB pengeluaran konsumsi kolektif sebesar 8,9% dan komponen konsumsi individu sebesar 6,83%. Secara umum, jika kita lihat dari gambar pertumbuhan

PDB Konsumsi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2021 ternyata PDB nasional memiliki kontribusi sebesar 8,51%.

Tabel 7. Postur Realisasi APBN terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional

Uraian (Triliun rupiah)	2020			2021			
	Realisasi s.d 31 Juli	2020 % Terhada P Perpres 72/2020	Growth y-o-y (%)	APBN	s.d 31 Juli	% terhadap APBN	Growth y-o-y (%)
Pendapatan Negara	922,5	54,3	(12,3)	1.743,6	1.031,5	59,2	11,8
▪ Penerimaan Pajak	602,0	50,2	(14,7)	1.229,6	647,7	52,7	7,6
▪ Kepabeanan dan Cukai	109,1	53,0	3,7	215,0	141,2	65,7	29,5
▪ PNBP	209,0	71,1	(13,5)	298,2	242,1	81,2	15,8
Belanja Negara	1.252,4	45,7	1,3	2.750,0	1.368,4	49,8	9,3
▪ Belanja Pemerintah Pusat	793,6	40,2	4,2	1.954,5	952,8	48,7	20,1
▪ Belanja K/L	419,7	50,2	(0,0)	1.032,0	549,2	53,2	30,9
▪ Belanja nonK/L	373,9	32,8	9,5	922,6	403,6	43,8	8,0
TKDD	458,8	60,1	(3,4)	795,5	415,5	52,2	(9,4)
▪ Transfer ke Daerah	410,9	59,3	(5,1)	723,5	380,3	52,6	(7,5)
▪ Dana Desa	47,9	67,3	14,4	72,0	35,2	48,9	(26,4)
Keseimbangan Primer	(147,1)			(633,1)	(143,6)		
Surplus /(Defisit)	(329,9)			(1.006,4)	(336,9)		
% terhadap PDB	(2,14)			(5,70)	(2,04)		
Pembiayaan Anggaran	502,7	48,4	115,2	1.006,4	447,8	44,5	(10,9)
SILPA/(SIKPA)	172,9				110,9		

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Melihat postur APBN di atas dapat digambarkan bahwa dampak dari kebijakan fiskal pemerintah memperlihatkan kinerja APBN sampai dengan Juli terus membaik. Pendapatan negara tumbuh 11,8% (yoy) lebih tinggi dibanding bulan Juni tahun 2020 dan belanja negara tumbuh positif 9,3% (yoy) yang artinya dapat bekerja sebagai motor pemulihan ekonomi dan SILPA menurun. Namun demikian dari postur di atas juga memperlihatkan penyaluran TKDD di tahun 2021 menghadapi kendala dalam mempercepat realisasinya dibandingkan tahun 2020.

Analisis Efisiensi Kebijakan Fiskal Terhadap Emisi Karbon

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Wahyuni et al., 2021). Selain itu, kita dapat melihat penerapan kebijakan fiskal pemerintah dalam mengalokasikan pengeluaran anggaran belanja dari beberapa sektor di antaranya sektor kesehatan, sektor energi industri transportasi, sektor kehutanan dan sektor pertanian. Periode yang digunakan adalah tahun 2020 dengan melihat *output* jumlah karbon dioksida (CO₂) pada satu periode tahun 2020. Anggaran belanja sendiri di *break down* dalam dua kategori menjadi anggaran kegiatan inti dan anggaran kegiatan pendukung.

Tabel 8. Sektor, Input dan Output

Sektor	Input 2020	Input 2020	Output 2020
	Kegiatan Inti	Kegiatan Pendukung	CO2
Kesehatan dan Limbah	212.536	55,93	5.526
Energi Industri Transportasi	8.772,97	11.377,33	83.839
Kehutanan dan Gambut	1.647,29	433,65	505.28
Pertanian	396,23	228,03	13.523

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan alat bantu Win4Deap untuk analisis Data Envelopment dengan fokus analisis input dari beberapa sektor yang dijadikan data input didapatkan hasil seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. Efficiency Summary Antar Sektor

Sektor	Efficiency Summary
Kesehatan dan Limbah	100%
Energi, Industri dan Transportasi	28%
Kehutanan dan Gambut	2%
Pertanian	100%
Rata-Rata	57,5%

Pada Tabel 9 menjelaskan bahwa sektor kesehatan dan limbah serta sektor pertanian memiliki tingkat efisiensi yang paling tinggi, yaitu sebesar 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan alokasi anggaran untuk mengurangi karbon dioksida (CO₂) terbilang sudah optimal. Sementara di beberapa sektor lain, seperti sektor energi, industri dan transportasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Puspita & Hartono (2021) menjelaskan bahwa kegiatan industri dan transportasi dengan system perdagangan terbuka memberikan hubungan positif terhadap tingkat emisi karbon (CO₂). Serta sektor kehutanan dan gambut sebagai paru-paru dunia dalam pemanfaatan alokasi anggaran untuk mengurangi CO₂ belum optimal, khususnya di sektor kehutanan dan gambut yang tingkat efisiensinya hanya mencapai 2%. Selanjutnya, dapat digambarkan *summary peers* dari semua sektor pada Tabel 10.

Tabel 10. Summary Peers dari Semua Sektor

Sektor	Peers	Peers
1 - Kesehatan dan Limbah	1 - Kesehatan & Limbah	
1 - Energi, Industri dan Transportasi	4 - Pertanian	
1 - Kehutanan dan Gambut	1 - Pertanian	1 - Kesehatan & Limbah
1 - Pertanian	A - Pertanian	

Dari beberapa sektor yang belum optimal, di antaranya sektor energi, industri dan transportasi dapat mengacu pemanfaatan anggaran yang dilakukan oleh sektor pertanian, sedangkan sektor kehutanan dan gambut dapat mengacu pemanfaatan anggaran pada sektor pertanian dan juga sektor kesehatan dan limbah agar dapat mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Hasil per variabel pada sektor energi, industri dan transportasi dapat diuraikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Per Variabel pada Sektor Energi, Industri dan Transportasi

Results for firm: 2

Technical efficiency = 1.000

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	83839.000	0.000	0.000	83839.000
input	1	8772.970	-6316.449	0.000	2456.521
input	2	11377.330	-8191.562	-1772.042	1413.725

LISTING OF PEERS:

peer	lambda weight
2	6.200

Sektor energi, industri, dan transportasi memiliki tingkat efisiensi masih rendah yaitu hanya 28%, sehingga anggaran yang dijadikan input inti dan input pendukung harus dilakukan pengurangan anggaran dari anggaran inti sebesar 8.772,97 miliar dikurangi 6.316,449 miliar sehingga menjadi 2.456,521 miliar untuk mencapai output yang optimal, yaitu pengurangan karbon dioksida (CO₂). Sementara itu, untuk anggaran pendukung juga harus dikurangi dari awalnya 11.377,330 miliar dikurangi 8.191,562 miliar menjadi 1.413,725 miliar. Peningkatan anggaran untuk sektor energi, industri dan transportasi akan berdampak juga pada meningkatnya konsumsi energi di masyarakat dan berkorelasi positif pada tingkat emisi karbon (CO₂) di Indonesia (Kristiani & Soetjipto, 2019).

Sektor kehutanan dan limbah anggaran awal yang diberikan masih sangat besar dan perlu pengurangan, dimana untuk optimalisasi efisiensi anggaran. Anggaran inti hanya dibutuhkan 32,354 miliar dan anggaran pendukung hanya membutuhkan anggaran sebesar 8,517 miliar untuk mencapai tingkat optimalisasi penggunaan input dalam pengurangan karbon dioksida (CO₂). Hasil analisis variabel sektor kehutanan dan limbah dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Analisis Variabel Sektor Kehutanan dan Limbah

Results for firm: 3

Technical efficiency = 0.020

PROJECTION SUMMARY:

Variable		Original value	radial movement	Slack Movement	projected value
Output	1	505.280	0.000	0.000	505.280
Input	1	1647.290	-1614.936	0.000	32.354
Input	2	433.650	-425.133	0.000	8.517

LISTING OF PEERS:

peer	lambda weight
4	0.037
1	0.000

EFFICIENCY SUMMARY:

Firm	crste	vrste	scale	
1	1.000	1.000	1.000	-
2	0.280	1.000	0.280	Drs
3	0.020	0.525	0.037	Irs
4	1.000	1.000	1.000	-
mean	0.575	0.881	0.579	

Sektor kesehatan dan limbah (1) dan sektor pertanian (4) telah berada pada tingkatan pemanfaatan anggaran yang optimal, akan tetapi dua sektor lainnya, yaitu sektor energi, industri dan transportasi (2) jika dilihat secara variabel sudah optimal namun secara konstan masih belum menunjukkan optimalisasi yang baik terhadap output yang ada sehingga masuk dalam kategori *Decreasing Return to Scale* (DRS). Dengan kata lain, setiap peningkatan anggaran pendukung dan anggaran inti dalam belanja pemerintah setiap sektor akan meningkatkan *output* berupa pengurangan karbon dioksida (CO₂).

Analisis Aktor (Stakeholders) di Kebijakan Fiskal

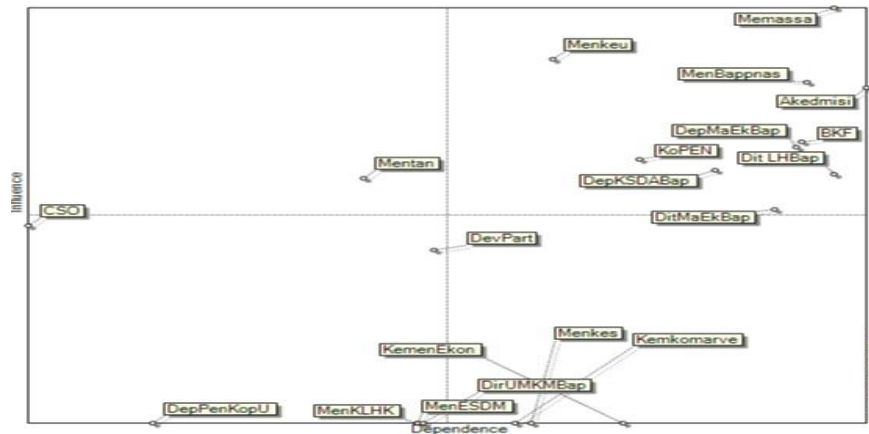
Aktor yang terlibat ada 12 diantaranya Badan Kebijakan fiskal, Direktorat Lingkungan Hidup BAPPENAS, Direktorat Makro Ekonomi BAPPENAS, Deputy Makro Ekonomi BAPPENAS, Deputy KSDA BAPPENAS, Komite PEN, Community Social Organization, Development Partner, Akademisi, Media Massa, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Pertanian, Menteri ESDM, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinator Ekonomi, Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Direktorat UMKM BAPPENAS, Deputy Pendanaan Kementerian Koperasi dan UMKM, Menteri Kesehatan. Pemetaan posisi dari masing-masing aktor dalam mencapai tujuan dapat dilihat dari tingkat pengaruh dan tingkat ketergantungan yang diberikan oleh setiap aktor, semakin besar nilainya maka semakin tinggi pengaruh dan ketergantungan terhadap aktor lainnya dalam mencapai tujuan. Hasil *Matrix of Direct and Indirect Influence* (MDII) (lihat Tabel 13).

Tabel 13. Matrix of Direct and Indirect Influence (MDII)

Aktor	Nilai Pengaruh (li)	Nilai Ketergantungan (di)
Badan Kebijakan Fiskal (BKF)	208	175
Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas (Dit LHBap)	184	181
Direktorat Makro Ekonomi Bappenas (DitMaEkBap)	158	170
Deputy Makro Ekonomi Bappenas (DepMaEkBap)	204	174
Deputy KSDA Bappenas (DepKSDABap)	187	159
Komite PEN (KoPEN)	195	145
Community Social Organization (CSO)	146	32
Development Partner (DevPart)	128	107
Akademisi (Akedmisi)	248	187
Media Massa (Memassa)	307	181
Menteri Keuangan (Menkeu)	269	129
Menteri Bappenas (MenBappnas)	252	176
Menteri Pertanian (Mentan)	181	94
Menteri ESDM (MenESDM)	0	104
Kemenko Maritim dan investasi (Kemkomarve)	0	122
Kemenko Ekonomi (KemenEkon)	0	142
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (MenKLHK)	0	104
Direktorat UMKM Bappenas (DirUMKMBap)	0	105
Deputy Pendanaan Kementerian Koperasi dan UMKM (DepPenKopU)	0	55
Mentari Kesehatan (Menkes)	0	125

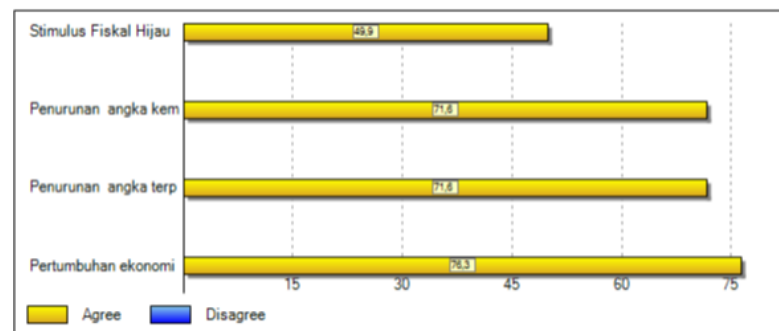
Pada Tabel 13 didapatkan bahwa urutan skor tertinggi terhadap nilai pengaruh langsung dan tidak langsung diawali dengan capaian aktor media massa dengan nilai 307,

aktor Kementerian Keuangan dengan nilai 269, dan aktor Bappenas dengan nilai 252. Ketiga aktor dengan skor tertinggi ini memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan tujuan, yaitu stimulus fiskal hijau, penurunan angka kematian COVID-19, penurunan angka terpapar COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi. Secara berurutan ketergantungan antar aktor baik secara langsung dan tidak langsung dengan skor tertinggi terdiri dari aktor akademisi, aktor media massa, dan Dit KLHK Bappenas. Akademisi memiliki ketergantungan tinggi terhadap masing-masing aktor sebagai pemberi saran kebijakan secara umum dan juga akademisi memiliki ketergantungan tentang tema penelitian terkait isu-isu yang dilempar oleh setiap aktor. Rincian pengaruh dan ketergantungan antar aktor secara lebih jelas dan terperinci dapat dilihat pada Gambar 11.



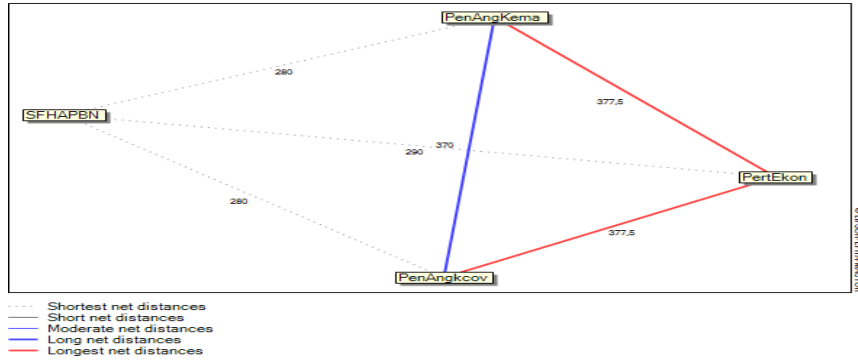
Gambar 11. Map of Influence and Dependences Between Actors

Pada Gambar 11 memperlihatkan bahwa aktor Media Massa, Kementerian Kesehatan, Kementerian Bappenas, Akademisi, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Makro Ekonomi Bappenas, Kopen, Dit LHBap, Dep KSDA Bappenas merupakan aktor utama yang memiliki ketergantungan dan pengaruh yang tinggi pada stimulus fiskal hijau, penurunan angka kematian dan angka terpapar COVID-19 serta pertumbuhan ekonomi. Sedangkan DepPenKopU, Kementerian KLHK, dan Kementerian ESDM memiliki ketergantungan dan pengaruh kecil terhadap tujuan. Gambar 12 menunjukkan tanggapan para aktor terkait 4 (empat) tujuan.



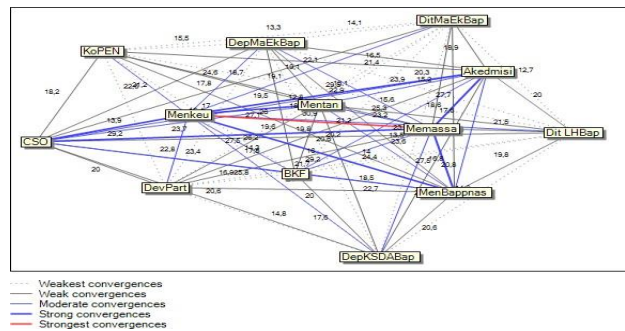
Gambar 12. Histogram of Actor's Mobilisation Towards its Objectives 3MAO

Secara umum semua aktor setuju dengan tujuan peningkatan stimulus fiskal hijau dengan skor 49.9. Kemudian skor penurunan angka kematian dan terpapar COVID-19 sebesar 71.6. Selanjutnya, capaian skor tertinggi sebesar 76.3 menjadi milik pertumbuhan ekonomi. Pada Gambar 13, dapat dilihat gambaran pola grafik dan hubungan masing-masing tujuan.



Gambar 13. Graph of Order 3 Convergences Between Actors

Tujuan penurunan angka kematian dan terpapar COVID-19 memiliki hubungan pengaruh dan ketergantungan yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika angka kematian dan terpapar COVID-19 bisa dikendalikan dengan baik. Selain itu, tujuan stimulus fiskal hijau memiliki pengaruh dan ketergantungan yang lemah lemah. Di era ini, pemerintah masih berfokus pada menangani COVID-19 untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tidak terlalu memikirkan pengaruh fiskal hijau. Gambar 14 memperlihatkan ketergantungan antar aktor.



Gambar 14. Graph of Order 3 Convergences Between Actors

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah sudah sesuai dengan apa yang disarankan oleh ekonom dunia seperti Blanchard dimana dalam kondisi resesi yang tidak normal ini maka kebijakan fiskal yang diambil adalah menekan tingkat infeksi COVID-19, mendukung

dunia usaha serta menargetkan bantuan tunai kepada masyarakat miskin. Hal itu semua tercermin dari kebijakan fiskal pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dampak penerapan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah memperlihatkan bahwa kinerja APBN sampai dengan Juli terus membaik. Pendapatan negara tumbuh 11,8% (yoy) lebih tinggi dibanding bulan Juni tahun 2020 dan belanja negara tumbuh positif 9,3% (yoy) yang artinya dapat bekerja sebagai motor pemulihan ekonomi. Namun demikian, penyaluran TKDD di tahun 2021 menghadapi kendala dalam mempercepat realisasinya dibandingkan tahun 2020. Dukungan fiskal tahun anggaran 2020 terhadap program Pembangunan Rendah Karbon yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 mengalami penurunan menjadi 2,8% dalam APBN apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2018-2019 ini dikarenakan dampak dari kebijakan relokasi anggaran Kementerian dan Lembaga. Sekaligus menggambarkan bahwa belum terintegrasinya aspek perubahan iklim dan lingkungan dalam proses pemulihan ekonomi nasional

Dari sisi efisiensi pengeluaran anggaran terhadap sektor-sektor yang dapat berkontribusi terhadap aspek lingkungan hidup dan menekan dampak perubahan iklim dapat disimpulkan bahwa: Sektor Kesehatan dan limbah (1) dan sektor pertanian (4) sudah berada pada tingkatan pemanfaatan anggaran yang optimal, akan tetapi di dua sektor yang ada diantaranya sektor energi, industri, transportasi (2) jika dilihat secara variabel sudah optimal namun secara konstan masih belum menunjukkan optimalisasi yang baik terhadap output yang ada, sehingga masuk dalam kategori *Decreasing Return to Scale* (DRS). Adanya peningkatan output yang tidak proporsional terhadap setiap penambahan input, sedangkan untuk sektor kehutanan dan limbah mengalami *increasing return to scale* (IRS) yaitu peningkatan input secara proporsional akan meningkatkan output lebih dari proporsi peningkatan input, dengan kata lain, setiap peningkatan anggaran pendukung dan anggaran inti dalam belanja pemerintah setiap sektor akan meningkatkan output yaitu pengurangan karbondioksida (CO₂).

Media massa, Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung tertinggi. Peran ketiga aktor ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan peningkatan stimulus fiskal hijau, penurunan angka kematian COVID-19, penurunan angka terpapar COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi. Media massa sangat memiliki pengaruh tinggi karena sebagai media informasi dalam memberitakan segala bentuk informasi positif dan negatif ke masyarakat, Kementerian Keuangan memiliki pengaruh karena sebagai sumber dana dalam mengalokasikan setiap program yang ada serta aktor BAPPENAS sebagai lembaga sinkronisasi program antar lembaga.

Daftar Pustaka

- Ariyani, N., & Fauzi, A. (2019). Analisis Tipologi Variabel Strategis pada Pengembangan Kawasan Ekowisata Kedung Ombo. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 196-2017. doi:10.14710/jwl.7.3.196-2017.
- Blanchard, O., Philippon, T., & Ferry, J. P. (2020). *A New Policy Toolkit Is Needed as Countries Exit COVID-19 Lockdowns*. Washington DC: Peterson Institute for International Economics.
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *INOVASI (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen)*, 206-213. Retrieved from <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8255/1092>
- Fauzi, A. (2019). *Teknik Analisis Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia.
- Gbohoui, W., & Medas, P. (2019). *Fiscal Affairs : Special Series on Fiscal Policies to Respond Covid 19 :Fiscal Rules, Escape Clauses, and Large*. America: IMF.

- Kristiani, A. W., & Soetjipto, W. (2019). Urbanisasi, Konsumsi Energi, dan Emisi CO₂: Adakah Perbedaan Korelasinya di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)? *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 166-180. doi:10.14710/jwl.7.3.166-180
- Lativa, S. (2021). Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, iii-iv. doi:10.37721/je.v23i3.876
- Mills, D. A., Payne, J., Sudirman, M., Wijaya, M. E., Mecca, B. M., Zeki, M., & Haesra, A. R. (2021). *Improving the impact of fiscal stimulus in Asia: An analysis of green recovery investments and opportunities*. Indonesia: Climate Policy Initiative : Vivid Economics.
- Mirani, K. P., Margareth, A. N., Cahyarani, N., & Maulana, A. (2021). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *BILANCIA (Jurnal ilmiah Akuntansi)*, 193-204. Retrieved from <https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/1089>
- Nawawi, A. (2021). *Optimalisasi Pendanaan Penanggulangan Perubahan Iklim*. Indonesia: Kementerian Keuangan (Direktorat Penyusunan APBN).
- Nawawi, A., & Irawan, F. (2010). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JEPI (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia)*, 159-174. doi:<https://doi.org/10.21002/jepi.v10i2.119>.
- Phillips, J., Heilman, F., Reitzenstein, A., & Palmer, R. (2020). *Green Recovery for Practitioners Setting the Course Towards a Sustainable, Inclusive and Resilient Transformation*. Berlin, Brussels: IMF.
- Puspita, N., & Hartono, D. (2021). Keterbukaan Perdagangan dan Emisi CO₂: Studi Empiris Tingkat Provinsi di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 272-292. doi:10.14710/jwl.9.3.272-292.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *JESYA (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 156-167. doi:10.36778/jesy.v3i2.193
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Wahyuni, A. Y., Juanda, B., & Purnamadewi, Y. L. (2021). Analisis Pengaruh Alokasi DAK Masing-Masing Bidang Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1-17. doi:10.14710/jwl.9.1.1-17
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 384-388. doi:10.33087/ekonomis.v4i2.179